Hak Privasi Perempuan dalam *Iddah*: Studi Antara Normativitas Islam dan Hak Asasi Manusia

M. Anwar Nawawi

Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang Lampung

E-mail: kiyaianwar1961@gmail.com

Abstrak

Gender berasal dari konsep hubungan social yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan, perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Bentuk ketidak-adilan gender yang berupa proses marginalisasi perempuan adalah suatu pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini disebabkan oleh perbedaan gender, ketidak-adilan gender menyebabkan ketidaknyamanan serta terbelenggunya hak kebebasan perempuan. *Iddah* bagi perempuan sangat memberikan posisi ketidakadilan bagi perempuan di mana hak-hak privasi perempuan terbelenggu dengan normative itu sendiri, oleh karena itu masalah *iddah* ini perlu pemaknaan ulang demi keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan memberikan hak gerak yang lebih luas, yang tentunya yang lebih manusiawi bagi perempuan.

Dalam masalah *iddah*, bagi laki-laki dan perempuan tetap memandang bahwa ketentuan-ketentuan *iddah* yang terkait dengan masa tunggu adalah mengandung hikmah bagi laki-laki maupun perempuan. Bahwa perkawinan adalah ikatan suci suami isteri dengan tujuan beribadah kepada Allah, sehingga, baik perempuan maupun laki-laki yang pernah terikat dalam ikatan perkawinan itu tidak begitu saja dengan mudah melupakan kesan dari mantan isterinya dan juga tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan zalim, dengan perempuan yang telah dicerai, khususnya bagi laki-laki agar tidak cepat-cepat untuk mengambil keputusan untuk mengambil pasangan baru tanpa memperhatikan kepentingan (perasaan) mantan suami isteri. Hak perempuan dalam masa *iddah* adalah meliputi hak dan kewajiban belajar, bersosial, ekonomi, berpolitik.

Kata Kunci: Hak, Perempuan, *Iddah*

Abstrack

Gender comes from the concept of social relations that distinguishes functions and roles between men and women, differentiation of functions and roles between men and women is not determined because both of them have biologic or natural differences, but are differentiated according to position, function and role of each in various fields of life and development. The form of

gender injustice in the form of the marginalization process of women is a poverty of one particular sex in this case due to gender differences, gender injustice causes discomfort and the freedom of women's rights is shaken. Iddah for women is very giving a position of injustice for women where women's privacy rights are shackled by normative itself, therefore this issue needs to be reinterpreted for the sake of justice and gender equality between men and women and gives them broader right to move, which is certainly more humane for women.

In *iddah* problems, for men and women, they still consider that the *iddah* provisions related to the waiting period are valuable for women and men. That marriage is the holy bond of husband and wife with the aim of worshiping God, so that both women and men who have ever been married in the marriage do not easily forget the impression of their ex-wife and also do no actions that lead to wrongdoing, with divorced women, especially for men so as not to quickly make a decision to take a new partner without regard to the interests feelings of the ex-husband and wife. Women's rights in the legal period include rights and obligations for learning, socializing, economics, politics.

Key word: Rights, women, Iddah

PENDAHULUAN

Keadilan gender merupakan salah satu isu penting yang muncul menjelang berakhirnya abad ke 20. Isu masalah gender ini telah menjadi bahasan yang memasuki setiap analisis sosial, menjadi pokok bahasan dalam wacana perdebatan mengenai perubahan social dan juga menjadi topik utama dalam perbincangan mengenai pembangunan dan perubahan sosial.¹ Istilah gender pada awalnya dikembangkan sebagai salah satu analisis ilmu sosial oleh Ann Oakley, dan sejak itu menurutnya gender lantas dianggap sebagai alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum.²

Secara normative-doktrinal, Islam dengan tegas mengakui konsep kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.³ Dari sini setidaknya ada dua hal yang bisa disimpulkan: *Pertama*, pengakuan secara umum atas kesetaraan anatar laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jenis kelamin. *Kedua*, mengakui

¹ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 333.

² Ann Oakley, *Sex, Gender, and Society* (New York, 1972), hlm. 23.

³ Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam* (Britain: Macmillan Press, 1998), hlm. 11.

atas kesejajaran hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang.⁴

Namun sangat ironis, kenyataan historis-empiris justru cenderung sebaliknya, yakni status dan peran perempuan diberbagai masyarakat hingga sekarang ini pada umumnya masih berada pada posisi dan kondisi yang belum mengembirakan. Impikasi yang ditimbulkan bermacam-macam, diantaranya perempuan mengalami ragam ketidak-adilan, marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan serta beban kerja yang sangat berlebihan.⁵ Sebagaimana disinggung oleh Nawal al-Sadawi, bahwa perempuan dalam budaya patriarki, misalnya di Mesir, perempuan yang dicerai oleh suaminya telah kehilangan bentuk ketidak-adilan hukum dan menanggung beban yang lebih berat. Setelah dicerai dan dikepung kedudukannya yang sulit (status janda), kecaman negative dari orang-orang sekitarnya, kekangan-kekangan yang membelit pribadi dan kemerdekaan sosialnya, tidak ada tanggung jawab si ayah (laki-laki) terhadap anaknya, membuat seorang ibu sering menanggung beban dan tanggung jawab yang lebih berat mengasuh anak-anaknya.⁶ Sebaliknya, para laki-laki tidak pernah kehilangan nilai kemerdekaan untuk memperturutkan “kebebasan seksualnya” kesenangannya, kawin atau cinta, dapat dengan mudah melupakan anak-anaknya. Terlebih lagi kebanyakan laki-laki yang menceraikan isterinya, dengan gampang menikahi wanita lain. Sementara perempuan harus menunggu dalam waktu tertentu, bahkan dalam hal tertentu akibat yang ditimbulkannya dari *iddah* mengucilkan peran dan membatasi ruang gerak perempuan yang telah bercerai dengan suaminya, baik sebagai bekas isteri (janda) maupun sebagai manusia pribadi.⁷

Masalah ketidak-adilan ini masuk kepada ranah hak-hak asasi manusia (HAM) yaitu hak terhadap perempuan, hak yang lama terkekang dan ini telah mengundang sorotan nasional maupun dari dunia Internasional, HAM secara eksplisit juga telah tercantum dalam Piagam PBB mengenai Deklarasi Universal HAM.⁸ Istilah gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk

⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 4.

⁵ Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12-23.

⁶ Nawal al-Sadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 405-406.

⁷ al-Sadawi, hlm. 405-406.

⁸ Lihat DUHAM Pasal 21.

menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara social.⁹ Gender adalah kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara cultural yang ada pada laki-laki dan perempuan, jenis kelamin adalah biologi yang bersifat permanen sedangkan gender adalah konstruksi sosial.¹⁰

Gender adalah pembagian laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara social maupun cultural, selain itu gender berasal dari konsep hubungan social yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan, perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.¹¹

Bentuk ketidak-adilan gender yang berupa proses marginalisasi perempuan adalah suatu pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini disebabkan oleh perbedaan gender, ketidak-adilan gender menyebabkan ketidaknyamanan serta terbelenggunya hak kebebasan perempuan sebagai manusia (HAM).¹² Secara etimologis, Hak Asasi Manusia (HAM) terbentuk dari tiga (3) kata, "*hak, asasi dan manusia*". Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sedangkan kata manusia berasal dari bahasa Indonesia. Kata *haqq* terambil dari kata *haqqa, yahiqqu, haqqaan*, artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu 'alaika an taf 'ala kadza*, itu artinya, "kamu wajib melakukan seperti ini." Berdasarkan pengertian tersebut, maka *haqq* adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa, yaussu, asasaan*, artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya.¹³ Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia.¹⁴

⁹ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1976).

¹⁰ Margert Mead, *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, 1935, hlm. 21.

¹¹ Noeleen Heyzer, *Daughters in Industry: Work, Skill, and Conscious of Women Workers in Asia* (Kuala Lumpur: Development Center, 1988), hlm. 31.

¹² Ibrahim Anis, *Mu'jam al-Wasith*, juz I (Beirut: dar al-Fikr, t.t.), hlm. 1815.

¹³ Munir Ba'al Bahi, *al-Mawrid; A Modern English Arabic Dictionary* (Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Maliyin, 1979), hlm. 798.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 334.

Membicarakan tentang hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁵ Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*).¹⁶ Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang patut memperoleh apresiasi secara positif.¹⁷

Iddah bagi perempuan secara “*Normativ*” sangat memberikan posisi ketidakadilan bagi perempuan di mana hak-hak privasi perempuan terbelenggu dengan normative itu sendiri, oleh karena itu masalah *iddah* ini perlu pemaknaan ulang demi keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan memberikan hak gerak yang lebih luas, yang tentunya yang lebih manusiawi bagi perempuan.

Asumsi ini memberikan posisi yang sangat sulit bagi kaum perempuan seluruh lapisan dunia, untuk mengembangkan diri di sector public, khususnya perempuan Indonesia, wanita Indonesia sulit untuk melepaskan diri dari beban ganda tersebut karena tugasnya dalam sector domestic dan sebagai pengasuh anak sudah merupakan persepsi budaya secara umum.

Dalam masyarakat modern industry seperti sekarang ini yang lebih memberikan kebebasan kepada perempuan untuk ikut aktif lebih luas diberbagai bidang, pada kenyataannya masih sulit untuk menghindari kenyataan dan persepsi diatas. Karenanya, mayoritas kaum feminis mensinyalir bahwa

¹⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 121.

¹⁶ Suparman Marzuki Riyadi Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia PUSHAM UII, 2008), hlm. 7.

¹⁷ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.56.

masyarakat industri sesungguhnya merupakan kelanjutan dari masyarakat tradisional yang tetap melestarikan system patriarki.¹⁸

Melihat fakta diatas, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah nasional maupun internasional untuk membuat suatu kebijakan guna mengembalikan kembali hak-hak asasi kaum perempuan, selain kebijakan pemerintah juga harus dilakukan suatu upaya-upaya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kemudian disosialisasikan secara luas diseluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Hal tersebut agar terwujud sebuah kesetaraan dan keadilan baik bagi perempuan dan laki-laki. Khususnya terkait dengan hak-hak privasi kaum perempuan dalam masa iddah, yang diperlukan pemaknaan ulang sesuai dengan konteks kekinian yang lebih menekankan kepada kesetaraan dan keadilan dan kemashlahatan bagi semua pihak khususnya pihak kaum perempuan atau isteri yang tertalak oleh suaminya (janda) yang diharuskan untuk melakukan masa iddah.

PEMBAHASAN

A. Teori atau Aliran dalam Gender

Dalam pembahasan tentang gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender di kenal adanya dua aliran atau teori, yaitu: teori *nurture* dan teori *nature*.

1. Teori *nurture*

Menurut teori *nurture* perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi social budaya, sehingga menghasilkan perantugas yang berbeda, perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi social menempatkan perempuan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentifikasikan sebagai kelas borjuis, sedangkan kaum perempuan sebagai kelas proletar.¹⁹

Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh kaum feminis Internasional yang cenderung mengejar persamaan (*sameness*) dengan konsep 50 : 50 (*fifty-fifty*) konsep yang kemudian dikenal sebagai istilah

¹⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: "Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 86-87.

¹⁹ Sri Sundari Sasongko, *Konsep dan Teori Gender* (Jakarta: Pusat dan Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2007), hlm. 17.

perfect equality (persamaan kuantitas). Perjuangan tersebut sulit untuk dicapai dikarenakan, sebagai hambatan baik dari nilai agama, maupun budaya. Randall Collin (1987) beranggapan bahwa keluarga adalah suatu wadah tempat pemaksaan, suami sebagai pemilik, sedangkan perempuan sebagai abdi. *Margrit Eichlen* beranggapan bahwa keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya budaya dan diskriminasi gender. Konsep social konflik menempatkan kaum laki-laki sebagai kaum penindas (borjuis) sedangkan kaum perempuan sebagai kaum tertindas (proletar). Bagi kaum proletar tidak ada pilihan kecuali berjuang menyingkirkan kaum penindas, demi untuk mencapai kebebasan dan persamaan (HAM). Oleh karena itu aliran *nature* melahirkan paham social konflik yang banyak dianut oleh masyarakat sosialis komunis, yang menghilangkan strata penduduk (egalitarian) paham social konflik memperjuangkan persamaan proporsional (*perfect equality*) dalam berbagai aktifitas masyarakat seperti di DPR, militer, menteri, gubernur, pilot dan pemimpin partai politik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuatlah program khusus (*affirmative action*)²⁰ guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan agar bisa termotifasi untuk merebut posisi yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki.

b. Teori Nature

Menurut teori nature, perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga tidak dapat dirubah dan bersifat universal sehingga harus diterima. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda. Dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan teori *nature*, lalu beralih kepada teori nature. Pendekatan *nature* dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup keluarga dan masyarakat.²¹

Perbedaan biologis diyakini memberikan pengaruh pada peran yang bersifat naluri (instinct) perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan, karena manusia memerlukan kemitraan dan kerjasama secara structural dan fungsional. Manusia baik laki-laki dan perempuan memiliki kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan social pembagian tugas (*division of labor*) begitu pula dalam keluarga. Harus ada

²⁰ Sasongko, hlm. 29.

²¹ Sasongko, hlm. 18.

kesepakatan antara suami-istri siapa yang menjadi kepala keluarga dan siapa yang menjadi ibu rumah tangga, dalam organisasi social juga ada pemimpin dan juga ada bawahan, (anggota) yang masing-masing mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tujuan. Tidak mungkin satu kapal dikomandani oleh dua nahkoda. Fahaman ini di ajarkan oleh *Socrates* dan *Plato*, yang kemudian di perbaharui oleh *Agust Comte* (1798-1857) *Emile Durkheim* (1858-1917) dan *Herbert Spenser* (1820-1930) yang mengatakan bahwa kehidupan kebersamaan.

c. Teori Equilibrium

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal.²² Jadi, dalam pembahasan gender dikenal tiga pendekatan, yaitu teori *nature*, teori *nurture*, dan teori *equilibrium*, seperti dalam skema berikut.

B. Kendala-kendala Penegakan Gender

1. Faktor Internal

Kendala ini berasal dari perempuan sendiri, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa struktur budaya, lingkungan, maupun budaya stereotip dalam masyarakat menjadi faktor-faktor penyebabnya, perempuan sering kali sukar untuk menemukan identitasnya dirinya secara pribadi, akibat budaya yang menyebabkan perempuan menemui kesulitan untuk menghilangkan perasaan malu dan bersalah. Ambisi pribadi yang didorong oleh emosi yang tidak terkendali akan mewujudkan fikiran yang tidak sehat, serta pandangan stereotip yang telah merasuk kedalam jiwa

²² Sasongko, hlm. 20.

mental perempuan, menyebabkan para kaum perempuan kerap kali tertinggal dalam pengambilan keputusan.²³

Dunia politik kerap kali identik dengan dunia laki-laki, karena seras dengan persaingan dan kecenderungan keras untuk terlibat didalamnya, selain iteligensi yang cukup diperlukan juga keberanian dan mental yang kuat, sedangkan secara umum perasaan perempuan, perempuan mempunyai karakter sebagai makhluk pemelihara yang melayani segala kebutuhannya hidup, khususnya lewat lingkungan keluarga, oleh karenanya perempuan bermental sebagai makhluk yang dependen, yang kurang berani dalam menerima, apabila merebut kekuasaan, selain itu, berbagai kelainan jiwa mudah hinggap dalam diri perempuan, seperti ketersaingan diri, dan sikap tertutup yang ekstrim.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang menghambat yang berasal dari luar diri kelompok perempuan, faktor eksternal ini dapat menjadi ancaman yang sangat serius. Misalnya: Agama dan masyarakat.

Mayoritas penduduk Indonesia meyakini bahwa suami adalah pemimpin keluarga. Al-Qur'an telah menyatakan bahwa kaum laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi kaum perempuan (istri), dari ayat ini posisi kaum laki-laki lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan, yang membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri.²⁴ Banyak ulama tafsir menyatakan bahwa perlu menaknaikan ulang terhadap ayat tersebut dan perlu pemaknaan ayat secara utuh terhadap ayat tersebut.

Budaya masyarakat Indonesia yang dilandasi agama, adalah budaya patriarkhis yang cenderung menempatkan laki-laki dalam posisi lebih tinggi dibandingkan kaum perempuan. Cara berfikir patriarkhi ini mengakumulasi terciptalah cara berfikir ini masuk kedalam segala aspek kehidupan, sehingga menghegemoni dan dianggap wajar, alamiah dan dianggap kodrat. Oleh karena itu, perempuan merasakan imbas yang sangat besar.²⁵

²³ A. Nunuk P. Murti, *Getar Gender* (Magelang: Indonesia Tera, 2003), hlm. 52.

²⁴ Al-Qur'an an-Nisa' [4]: 34.

²⁵ Santi Wijaya Hesti Utami, *Kesetaraan Gender "Langkah Menuju Demokratisasi Desa* (Yogyakarta: IP. Lappera Indonesia, 2001), hlm. 6-7.

C. Mengungkap “Tabir” Hak Privasi Perempuan Dalam Iddah

Memperhatikan hak-hak perempuan dalam kaitannya dengan kesetaraan gender berarti melihat hak-hak manusia secara keseluruhan. Sebagai pribadi, baik laki-laki maupun perempuan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hak merupakan suatu yang menjadi bagian seseorang dari orang lain, dan kewajiban sebagai pemenuhan atas hak orang lain atas dirinya. Antara hak dan kewajiban keduanya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan selalu berkaitan. Hak perempuan berarti bagian yang harus diperoleh dari laki-laki dan menjadi kewajiban laki-laki demikian sebaliknya hak laki-laki sebagai bagian yang harus diperoleh dari perempuan dan menjadi kewajiban perempuan. Oleh sebab itu, antara hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan merupakan dua hal yang saling terkait.

Demikian halnya dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang ketika sudah terikat tali oleh ikatan perkawinan, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban baru sebagai suami isteri. Hak suami menjadi kewajiban isteri, dan sebaliknya kewajiban suami menjadi hak isterinya selama belum terputus ikatan perkawinan antara keduanya. Bahkan lebih jauh, hubungan hak dan kewajiban antara suami isteri masih berhubungan sampai setelah putusnya tali ikatan perkawinan antara keduanya yang disebut dengan perceraian.²⁶

Sejak terjadi perceraian inilah mulai adanya masalah “*iddah*” (masa tunggu) yang hanya berlaku bagi seorang perempuan, (isteri) dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggung, baik secara materiil, biologis sampai psikologis. Hal ini sebagaimana disinggung oleh Nawal al-Sadawi, bahwa perempuan dalam budaya patriarki, misalnya di Mesir, perempuan yang dicerai oleh suaminya telah kehilangan bentuk ketidak-adilan hukum dan menanggung beban yang lebih berat. Setelah dicerai dan dikeping kedudukannya yang sulit (status janda), kecemasan negatif dari orang-orang sekitarnya, kekangan-kekangan yang membelit pribadi dan kemerdekaan sosialnya, tidak ada tanggung jawab si ayah (laki-laki) terhadap anaknya, membuat seorang ibu sering menanggung beban dan tanggung jawab yang lebih berat mengasuh anak-anaknya.²⁷

²⁶ Muchammad Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm 117.

²⁷ al-Sadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, hlm. 405-406.

Sebaliknya, para laki-laki tidak pernah kehilangan nilai kemerdekaan untuk memperturutkan “kebebasan seksualnya” kesenangannya, kawin atau cinta, dapat dengan mudah melupakan anak-anaknya. Terlebih lagi kebanyakan laki-laki yang menceraikan isterinya, dengan gampang menikahi wanita lain. Sementara perempuan harus menunggu dalam waktu tertentu, bahkan dalam hal tertentu akibat yang ditimbulkannya dari *iddah* mengucilkan peran dan membatasi ruang gerak perempuan yang telah bercerai dengan suaminya, baik sebagai bekas isteri (janda) maupun sebagai manusia pribadi.²⁸

Dengan putusannya ikatan tali perkawinan, maka hak-hak antara suami isteri masih ada, meski tidak sebesar dengan ketika masih dalam ikatan perkawinan, khususnya berkenaan dengan hak isteri sebagai perempuan yang sudah di talak, baik hak atas diri maupun hak atas harta dan anaknya. Lebih-lebih lagi terkait dengan hak kebebasan bagi perempuan yang ditalak, kemungkinan munculnya masalah cukup banyak, implikasinya bisa berhubungan dengan hukum, social, ekonomi, dan masalah ekonomi.

Lebih spesifik, masa tunggu (*iddah*) bagi perempuan yang ditalak merupakan salah satu hal yang perlu dicermati, apalagi itu dikaitkan dengan hak kebebasan sebagai manusia pribadi atau individu sebagaimana laki-laki, mengapa bagi perempuan ada masa tunggu yang dikenal dengan istilah fiqih dengan sebutan *iddah*. Sedangkan bagi laki-laki tidak berlaku masa tunggu apakah ini sebagai bentuk dari bias gender hubungan laki-perempuan dengan mendiskritkan pihak perempuan? Atau apakah perbedaan pelakuan hukum yang demikian terbuka kemungkinan dapat diubah? dan masih banyak lagi pertanyaan yang kemudian muncul.

Lebih dari itu, adanya pembatasan ruang gerak bagi perempuan yang telah diceraikan (dengan status janda) mendapat legitimasi dari ketentuan-ketentuan agama dengan adanya nas (al-Qur'an dan al-Hadis) yang mengindikasikan demikian. Apalagi dengan adanya ayat yang mengabut atau yang mengharuskan bagi perempuan yang telah ditalak untuk tinggal dirumah, tidak boleh keluar rumah dengan alasan menjaga diri perempuan dan citranya.²⁹

Ditambah lagi dengan adanya larangan untuk segera menikah lagi dengan laki-laki lain, tidak boleh menerima peminangan dari laki-laki, dan

²⁸ al-Sadawi, hlm. 405-406.

²⁹ Al-Qur'an al-Talaq [65]: 1.

larangan-larangan lainnya yang membatasi kebebasan pribadi perempuan sebagai manusia yang merdeka juga dengan alasan untuk menjaga kesucian perempuan. Hal-hal demikian menjadi masalah yang cukup serius ketika dilihat dari perspektif kesetaraan dan hak-hak asasi manusia HAM dan keadilan gender.³⁰

Adanya ketentuan masa tunggu (*'iddah*) bagi perempuan yang ditalak selalu dikaitkan dengan alasan untuk mengetahui kemungkinan hamil atau tidaknya perempuan yang telah ditalak. Atau sebagai tanda bukti kesetiaan dan penghormatan sekaligus tanda duka cita kepada mantan suaminya.

Oleh sebab itu, tulisan tentang gender dan *iddah* ini menjadi urgen dalam rangka memposisikan masalah hukum (fiqih) ini secara proposional. Mengingat fiqih merupakan hasil interpretasi akal (ulama) atas nash yang tentunya sangat terbuka peluang untuk melakukan rekonstruksi pemikiran fiqih, dan juga dalam kerangka membangun fiqih yang berkeadilan dan kemashlahatan bagi manusia.

Selama ini tulisan maupun kajian yang berkenaan dengan *iddah* (masa tunggu) bagi perempuan yang ditalak atau yang telah bercerai dengan suaminya, hampir semua kitab fiqih dari yang klasik masalah *iddah* tertuang pada bagian *ahwal al-Syakhsyah* yang *integrated dalm* fiqih munakahat yang meliputi rangkaian masalah dari proses akan melakukan *iddah* sampai pasca perceraian (talak), fokus kajian umumnya terbatas pada diskripsi *iddah* dan macam-macamnya yang masih terkesan “*Normativ Tekstual* ” yakni pemahaman taks dari nas-nas yang berkaitan dengan masa *iddah* sebagaimana yang termuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis. Sebut saja misalnya *Fiqih al-Sunnah* oleh Sayyid Sabiq,³¹ al-Juzairi dalam *al-Fiqih 'Ala Mazabib al-Arba'h, Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* oleh Ibnu Rusyd,³² sampai kitab fiqih modern *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh* oleh Wahbah Azuhaili,³³ dan masih banyak lagi yang lainnya. Atau dalam kitab tafsir seperti Tafsir al-Thabari', Tafsir al-Qurthubi, Tafsir Jalalain dan lain sebagainya.

³⁰ Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, hlm. 220.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, jilid II (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm. 277-278.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayahul Muqtashid*, Jilid II (Beirut: Daar al-Fikr, t.t.), hlm. 71-73.

³³ Wahbah Azuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 653-674.

Dari sekian banyak kitab atau referensi lain tentang masalah iddah, baik fiqh maupun tafsir, masih sedikit kajian yang secara spesifik mengungkap hakikat tentang iddah dikaitkan dengan hak-hak privasi perempuan sebagai individu yang merdeka (setelah bercerai) sebagaimana laki-laki. Oleh sebab itu, tulisan ini akan berusaha mengungkap tabir “kelabu” tentang *iddah* bagi perempuan yang telah dicerai dengan suaminya, khususnya dikaitkan dengan hak privasi perempuan dalam *iddah* yang terkait dengan Antara Normativitas Islam dan hak asasi manusia (HAM) sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Mengingat masalah *iddah* sangat erat kaitannya dengan relasi perempuan dan laki-laki, maka perspektif gender menjadi sangat diperlukan, dengan menempatkan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang antara hak dan kewajibannya, tanpa mendeskripsikan yang satu dengan yang lainnya, sebagaimana gender didefinisikan sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi social-budaya, bukan dari sudut perbedaan biologis.³⁴

D. Hak-hak Perempuan Selama Iddah

Berkenaan dengan ketentuan iddah, al-Qur'an mengungkapkan dalam beberapa ayat yang menerangkan tentang iddah dengan berbagai situasi terkait dengan kondisi isteri ketika di talak, hal ini tertuang dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 228. Q.S. al-Ahzab [33]: 49. Q.S. al-Thalak [65]: 1 dan ayat 4. Sehubungan dengan iddah dalam al-Qur'an, maka iddah menurut ulama fiqh adalah sesuatu yang wajib dijalani bagi perempuan menurut syara' berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma' Ulama. Yakni bagi mantan isteri yang telah bercerai dengan suaminya atau suaminya meninggal dunia wajib menunggu dan lama waktunya ditentukan oleh syara' sesuai dengan keadaan suami yang bercerai atau keadaan isteri yang dicerai.³⁵

1. Masalah Tempat Tinggal Isteri Selama Dalam Masa Iddah

Bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah, berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah dari mantan suaminya, sebagaimana kewajibannya adalah tetap tinggal di rumah mereka sampai habis masa iddah. Ia tidak boleh keluar rumah, dan suami tidak boleh mengeluarkan

³⁴ Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 8-9.

³⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 229.

dari rumahnya meskipun saat terjadi talak ia tidak berada di rumah.³⁶ Hal ini terdapat dalam Q.S. al-Thalak [65]: 1. Dari ayat ini dipahami oleh semua ulama bahwa perempuan yang dicerai oleh suaminya harus tinggal di rumah mereka selama masa iddahnya. Ia tidak boleh keluar (meninggalkan) tempat tinggalnya (rumahnya).³⁷

2. Masalah Hak Nafkah

Bagi isteri yang di talak *raj'i* (yakni talak yang masih ada peluang untuk rujuk/kembali sebagai suami-isteri), maka ia (isteri yang telah dicerai) berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.³⁸ Nafkah yang menjadi haknya adalah nafkah sebagaimana nafkah yang diberikan oleh suaminya ketika masih dalam ikatan perkawinan. Dan juga ia berhak untuk tinggal di rumah bersama suaminya, suami wajib member hak nafkah selama dalam masa iddah isterinya yang telah ditalak *raj'i*. demikian juga ketika mereka telah dikaruniai anak. Sedangkan bagi isteri yang telah bercerai dengan talak *bain*, maka baginya tidak ada nafkah dan tempat tinggal, artinya suaminya yang menceraikannya tidak diwajibkan member nafkah dan tempat tinggal.

E. Hak-Hak Privasi Perempuan Dalam 'Iddah: "Suatu Upaya Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender"

Ada banyak ayat yang menjelaskan bahwa antara perempuan dan laki-laki sebagai manusia adalah sama dihadapan Allah SWT. Masing-masing berada pada posisi yang setara dan seimbang terkait dengan dengan kewajiban dan haknya.³⁹ Dengan demikian, merujuk pada ayat-ayat tersebut, dan dengan memperhatikan dan dengan memperhatikan ayat-ayat lain, seperti an-Nisa' [4]: 142 ali-Imran [3]: 195. Dan lain-lain. Maka jelaslah bahwa kedudukan, hak, dan tanggung jawab mereka (laki-laki dan perempuan) sebagai manusia di dalam keluarga. Masdar F. Mas'udi dalam hal ini menandai, bahwa apa yang disebut dalam al-Hujurat [7]: 13 an-Nisa' [4]: 142 tersebut tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah sejajar yang bersifat *qoth'i* (*fundamental*), yaitu bahwa derajat manusia antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan secara apriori (begitu saja) oleh jenis kelamin, melainkan ditentukan oleh amal dan taqwanya. Inilah ajaran yang

³⁶ Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, hlm. 284.

³⁷ Azuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, hlm 654.

³⁸ Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hlm. 325.

³⁹ Al-Qur'an al-Hujurat [49]: 13. Al-Qur'an An-Nisa' [4]: 32 dan 124. Al-Qur'an An-Nahl [16]: 97.

qoth'i perihal hubungan laki-laki dan perempuan, kesetaraan sebagai sesama manusia.⁴⁰

Hak-hak Perempuan di Luar Rumah

1. Hak dan Kewajiban Belajar (Pendidikan)

Cukup banyak ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang membicarakan tentang kewajiban belajar, baik kewajiban itu ditunjukkan kepada laki-laki maupun perempuan, perempuan maupun laki-laki di perintahkan untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin.

Jika diyakini bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, maka segala bentuk hambatan harus dihapuskan. Baik hambatan yang disebabkan kebijakan politik, nilai budaya, maupun pemikiran keagamaan. Karena itu, beberapa teks hadis yang dari sisi sanad sebenarnya adalah lemah, yang menghambat aktivitas pendidikan perempuan harus segera dihentikan pengajaran dan periwayatannya. Apabila teks-teks hadis tersebut tertulis dalam kitab-kitab maupun buku kurikulum, ia harus dibaca ulang dengan pengetahuan yang memadai, seperti hadis yang memerintahkan perempuan untuk selamanya tinggal di dalam rumah untuk mengikuti perintah suaminya dan melayani segala kebutuhannya.⁴¹

Teks hadis yang seperti ini akan banyak menghambat perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan pendidikan. Beberapa teks hadis yang sejenis juga harus dikritik dan dimaknai ulang. Seperti juga hadis pelarangan perempuan untuk terlibat langsung aktivitas masjid. Pelarangan perempuan untuk shalat di masjid, berarti penghambatan terhadap perempuan untuk memperoleh pengetahuan, pendidikan dan informasi. Karena masjid bagi umat Islam adalah pusat pengetahuan dan informasi termasuk pendidikan. Karena masjid bagi umat Islam adalah pusat pengetahuan dan pendidikan, disamping sarana untuk ibadah ritual. Teks hadis tersebut adalah pembicaraan ini adalah pernyataan Nabi Muhammad SAW :

“Shalat perempuan didalam rumahnya lebih baik dari pada shalatnya di dalam masjid” (Riwayat al-Baihaqi, *Sunan al-Qubra*, juz III, hlm. 132).

⁴⁰ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Perempuan* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 54.

⁴¹ FK3, *Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqud l-Lujjain*, 2001, hlm. 126-128.

Golongan *Hanafi* juga berpendapat bahwa bahwa perempuan yang ditalak oleh suaminya ditalak *roj'i* maupun talak *ba'in* tidak boleh keluar rumah (dilarang) siang maupun malam.⁴²

Sekalipun sanad teks ini secara sanad adalah *shahih* (kuat dan diterima), seperti yang dinyatakan Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, al-Hasytamy dan as-Suyuthi, tetapi ia menyalahi teks-teks hadis lain yang lebih kuat dan bertentangan dengan fakta-fakta sejarah. Dalam teks lain, yang diriwayatkan Bukhari-Muslim dan at-Turmudzi, Nabi SAW menyatakan:

“Apabila isterimu meminta izin untuk pergi ke masjid di malam hari, maka janganlah dihalangi.

Atau:

*“Janganlah menghalangi para perempuan yang ingin pergi ke masjid Allah”.*⁴³

Dengan argumentasi ini, dan beberapa argumentasi yang lain, bahwa hadis pelarangan perempuan untuk pergi ke masjid adalah lemah dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.⁴⁴ Saat ini pelarangan seorang khususnya perempuan untuk pergi ke masjid, atau tempat-tempat public yang lain yang mendatangkan manfaat adalah bertentangan dengan hak seseorang tersebut untuk memperoleh manfaat pengetahuan dan informasi dan pendidikan. Pendidikan adalah hak bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam bahasa hadis:

*“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah”*⁴⁵

Dalam hal ini perempuan yang dalam masa iddah menurut syara' boleh belajar diluar rumah, apalagi belajar ilmu agama. Seperti dipengajian-pengajian, majelis ta'lim dan sebagainya. Kebolehan ini didasarkan kepada pesan umum diatas dan didasarkan kepada kemashlahatan bagi perempuan yang berhak untuk bergabung dan mengaktualisasikan potensi dirinya.⁴⁶

⁴² Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, hlm. 133.

⁴³ Ibn al-Atsir, juz XI, nomor hadis 8698), hlm. 467.

⁴⁴ Ali Bin Ahmad w. 456 H/1064M. FK3, 2001, hlm. 115.

⁴⁵ Riwayat Ibn Majjah, al-Baihaqi dan Ibn Abd al-Barr.

⁴⁶ Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, hlm. 238.

2. Hak-hak Reproduksi Perempuan

Dalam Islam, hak-hak reproduksi merupakan tidak lain adalah bagian dari keseluruhan hak-hak manusia perempuan selaku pengemban amanat reproduksi umat manusia. Berkenaan dengan itu, ada tiga kategori hak-hak perempuan (ibu) sebagai pengemban fungsi reproduksi.

Pertama, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat resiko yang dihadapi sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksi-nya, mulai dari menstruasi, hubungan seks, mengandung, melahirkan dan menyusui.

Kedua, adalah hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan dan menyusui) berlangsung, tetapi diluar masa-masa itu dalam statusnya sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya.⁴⁷ *Ketiga*, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan isteri, khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi

3. Hak Ekonomi, Sosial dan Politik

Dalam urusan yang menyangkut kepentingan public atau orang banyak, masih ada kesan perempuan dibatasi ruang geraknya disebabkan beberapa alasan, diantaranya, *pertama*, adanya Q.S. an-Nisa' [4]: 34. Ayat ini dipahami oleh sebagian umat Islam (termasuk ulama) bahwa yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki. *Kedua*, adanya sebuah hadis yang menyatakan : "*Lan yufliha qaum wallau amrahum imra'ah*" (tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan). Ketentuan diatas perlu ditafsirkan atau dimaknai ulang, sesuai dengan konteks kekinian, demi keadilan gender dan hak asasi manusia dan hak untuk mendapatkan pendidikan.

F. Reinterpretasi Ketentuan Iddah Menuju Keadilan Gender

1. Masalah Iddah Sebagai Masalah Bersama Antara Suami Isteri

Mengingat keluarga adalah sebuah ikatan suci antar seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui pernikahan, maka sejak terjadinya pernikahan keduanya terikat dengan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Apapun yang berkaitan dengan urusan rumah tangga menjadi urusan bersama, baik mengenai urusan tempat tinggal, nafkah, anak, dan sebagainya.

⁴⁷ Al-Qur'an al-Baqarah [2]: 133.

Termasuk di dalamnya ketika bahtera rumah tangga mengalami “bencana” tidak dapat diteruskan dan ikatan tali pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan, maka menyangkut urusan bersama. Disinilah putusnya perkawinan terjadi dengan bercerai (talak). Perceraian merupakan masalah bersama antara suami dan isteri. Perceraian ditempuh sebagai jalan terakhir (terpaksa/darurat) untuk mengakhiri kesulitan-kesulitan urusan rumah tangga.⁴⁸ oleh sebab itu konsekwensi yang diakibatkan dari perceraian adalah mengikat kepada kedua belah pihak, baik mantan isteri maupun mantan suami. Ketika perceraian dipandang sebagai “bencana” dalam sebuah rumah tangga, maka yang harus menanggung dari suatu bencana tersebut adalah harus kedua belah pihak suami-isteri.⁴⁹

Adapun diantar hikmah dari suatu perceraian adalah agar suami isteri yang sudah bercerai untuk melakukan “intropeksi diri” apakah masih akan menjalin kembali tali cinta kasih (pada kasus talak *raj'i*), atau tetap akan memutuskan untuk bercerai. Apabila yang dipilih adalah memutuskan hubungan pernikahan sebagai suami-isteri, maka konsekwensi-konsekwensi yang diakibatkan dari suatu perceraian tetap mengikat kepada keduanya. apakah berkaitan dengan hak kewajiban, baik nafkah, harta, maupun anak. Dalam hal ini tidak ada perlakuan yang berat sebelah, dengan membebaskan yang satu (suami) dan mengikat atau membelenggu hak-haknya atau membatasi yang lain (isteri).

Mengenai masalah iddah yang selama ini terkesan dibebankan kepada isteri dan mengikat pihak isteri saja, tentunya tidak demikian. Perceraian sebagai “bencana” rumah tangga tidak bisa hanya dibebankan hanya kepada pihak perempuan (mantan isteri). Berkenaan dengan nash (ayat al-Qur'an dan al-Hadis) yang mengikat perempuan yang ditalak, maka ayat tersebut perlu difahami dan dicermati makna filosofi syari'ahnya (*maqasid al-Syar'i*) dan diperlakukan secara proporsional dengan hak privasi perempuan. Jika isteri yang dikenakan talak dikenakanra bernagai larangan terkait dengan “hak pribadinya”, maka pihak laki-laki juga harus memperhatikan “perasaan” perempuan yang di

⁴⁸ Azuhaili, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, hlm. 358.

⁴⁹ Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 206.

talak. Pada pihak laki-laki mestinya juga mempunyai toleransi terhadap mantan isteri.⁵⁰

Jika perempuan yang ditalak tidak boleh menerima lamaran (*khitbah*) dari laki-laki lain hanya karena dengan alasan untuk mengetahui isi rahimnya, apakah sedang hamil atau tidak, untuk masa sekarang tidak harus menunggu sekian lama (misalnya dua atau tiga bulan) maka cukup dengan alat tes kehamilan (seperti sensitive) tentang hamil tidaknya seseorang bisa diketahui setelah seminggu dari persetubuhan. Ada apa dibalik masa tunggu yang dengan tiga kali *quru'*? tidak cukup dengan alasan untuk mengetahui isi rahim perempuan. Demikian juga masa tunggu yang lain apakah dengan empat bulan sepuluh hari, melahirkan atau yang lain. Apa hakikat dari masa iddah bagi mantan suami-isteri? Disinilah kiranya perlu mengungkap hakekatnya.

Mencari hakikat dan hikmah dibalik ketentuan iddah adalah menjadi suatu keharusan. Mengingat dulu ketika sebelum terjadinya perkawinan, baik laki-laki dan perempuan adalah manusia yang merdeka tidak terikat satu dengan yang lainnya, yang kemudian mengikatkan diri keduanya dalam sebuah ikatan pernikahan yang menyatukan berbagai perbedaan, jenis kelamin, status, sifat karakter, dan perbedaan-perbedaan lain dari masing-masing menjadi satu keluarga, maka yang perlu diperhatikan adalah tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu untuk membentuk keluarga *sakinah mawadah wa rahmah dengan tujuan bersama*. Disini adalah kesamaan-kesamaan dan titik temu antara suami-isteri, sejak terjadinya pernikahan, timbulah hak dan kewajiban.

Oleh sebab itu, jika sekiranya tujuan dari pernikahan itu tidak dapat dicapai, dan keutuhan rumah tangga tidak bisa diteruskan, maka yang bertanggung jawab dan menanggung segala akibatnya adalah bersama pula, yaitu pihak laki-laki dan perempuan (suami-isteri). Jika telah terjadi perceraian, dan (mantan) isteri tidak boleh menerima lamaran, maka seharusnya juga sepatutnya (mantan suami) jangan cepat-cepat untuk menggandeng perempuan lain sebagai pengganti dengan pernikahannya. Bagaimana perasaan mantan isterinya? Apakah segampang itu melupakan makna sebuah perkawinan? Tentunya tidak demikian, hanya dengan berlindung karena tidak ada larangan nash bagi laki-laki (tidak berlaku

⁵⁰ Sodik, *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, hlm. 243.

iddah atau masa tunggu). Kecuali jika memang nyata-nyata penyebab putusnya hubungan perkawinan disebabkan oleh isteri, misalnya isteri berbuat dosa besar (berzina) dan tidak bisa dinasehati dan diperbaiki, itu juga harus ditempuh dengan cara yang *ma'ruf*.

Padahal jika dicermati, ada dalil lain (nas) yang bisa mengikat mantan suami agar tidak seenaknya memperlakukan mantan isterinya. Jangan sampai mantan suami-isteri saling berbuat zalim satu dengan yang lainnya. Hal ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 279. Apakah tidak zalim namanya, jika seorang perempuan (mantan isteri) diharuskan menunggu, tidak boleh menerima, lamaran laki-laki lain, sementara, mantan suaminya seenaknya mencari perempuan lain sebagai penggantinya. Selain itu juga nas yang memerintahkan kepada laki-laki (suami) memperlakukan isterinya dengan baik *ma'asyarah bi al-ma'ruf*.⁵¹ Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka masalah iddah harus dipahami dalam perspektif kolektif, yakni mengikat secara bersama laki-laki dan perempuan sebagai masalah bersama.

2. Setelah Terjadi Perceraian, Maka Hak-hak Privasi Perempuan (isteri) Kembali Kepada Keadaan Semula Sebelum Terjadinya Pernikahan.

Sebagai manusia, perempuan yang telah bercerai dari suaminya, maka ia memiliki hak-hak privasi yang melekat pada dirinya. Hak bersumber dari Khalik Maha Pencipta dan Ia tetap tegak dan terlaksana, bukan seperti konsepsi yang dibuat manusia.⁵² Mr. Kuntjoro Purbopranoto dalam bukunya : "*Hak Asasi Manusia dan Pancasila*", menyebutkan bahwa manusia dititahkan dalam keadaan sama bahwa manusia dikarunia oleh Yang Maha Kuasa beberapa yang tetap dan melekat padanya (manusia) dan sebagainya.⁵³ Misalnya saja sebelum menikah, ia boleh melakukan aktivitas pribadi secara bebas (perbuatan baik yang bertanggung jawab) misalnya saja menuntut ilmu, melakukan berbagai kegiatan public, bekerja berorganisasi, melakukan belajar (pendidikan) seperti yang tertulis diatas bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang baik laki-laki

⁵¹ Al-Qur'an an-Nisa' [4]: 19.

⁵² Dalizar, *Konsepsi al-Qur'an Tentang Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987), hlm. 43.

⁵³ Mr. Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dan Pancasila* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm. 17.

maupun perempuan, maka segala bentuk hambatan harus dihapuskan. Baik hambatan yang disebabkan kebijakan politik, nilai budaya, maupun pemikiran keagamaan. Karena itu, beberapa teks hadis yang dari sisi sanad sebenarnya adalah lemah, yang menghambat aktivitas pendidikan perempuan harus segera dihentikan pengajaran dan periwayatannya. Apabila teks-teks hadis tersebut tertulis dalam kitab-kitab maupun buku kurikulum, ia harus dibaca ulang dengan pengetahuan yang memadai, seperti hadis yang memerintahkan perempuan untuk selamanya tinggal di dalam rumah untuk mengikuti perintah suaminya dan melayani segala kebutuhannya.

Oleh karena itu, setelah mereka bercerai tentunya boleh melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, meski dirinya masih terikat dengan masa tunggu (iddah), selama kegiatan tersebut tidak sampai melanggar norma-norma pokok (*stari'at asliyah*) yang menghalangi, seperti menimbulkan mafsadah bagi dirinya atau orang lain.

Jika perempuan yang telah bercerai dapat menjaga dirinya dari segala fitnah dan tidak akan membahayakan dirinya, kenapa tidak? Melakukan aktivitas (amal saleh) tidak ada larangan baginya dalam rangka mengaktualisasikan dirinya.⁵⁴

KESIMPULAN

Iddah bagi perempuan secara “*Normativ*” sangat memberikan posisi ketidakadilan bagi perempuan diaman hak-hak privasi perempuan terbelenggu dengan normative itu sendiri, oleh karena itu masalah *iddah* ini perlu pemaknaan ulang demi keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan memberikan hak gerak luang yang lebih manusiawi bagi perempuan. Jangan sampai dengan ketentuan adanya *iddah* bagi perempuan dan kemudian kebebasan perempuan sebagai manusia harus hilang, seperti halnya hak keluar rumah, hak dilarang menerima lamaran laki-laki lain, hak belajar (pendidikan) dan lain sebagainya.

Jika diyakini bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang baik laki-laki maupun perempuan, maka segala bentuk hambatan harus dihapuskan. Baik hambatan yang disebabkan kebijakan politik, nilai budaya, maupun pemikiran keagamaan. Karena itu, beberapa teks hadis yang dari sisi sanad sebenarnya adalah lemah, yang menghambat aktivitas pendidikan perempuan harus segera

⁵⁴ Al-Qur'an an-Nisa' [4]: 32.

dihentikan pengajaran dan periwayatannya. Apabila teks-teks hadis tersebut tertulis dalam kitab-kitab maupun buku kurikulum, ia harus dibaca ulang dengan pengetahuan yang memadai.

Dalam masalah iddah, bagi laki-laki dan perempuan tetap memandang bahwa ketentuan-ketentuan iddah yang terkait dengan masa tunggu adalah mengandung hikmah bagi laki-laki maupun perempuan. Bahwa perkawinan adalah ikatan suci suami isteri dengan tujuan beribadah kepada Allah, sehingga, baik perempuan maupun laki-laki yang pernah terikat dalam ikatan perkawinan itu tidak begitu saja dengan mudah melupakan “kesan” dari mantan isterinya dan juga tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan zalim, dengan perempuan yang telah dicerai, khususnya bagi laki-laki agar tidak cepat-cepat untuk mengambil keputusan untuk mengambil pasangan baru tanpa memperhatikan kepentingan (perasaan) mantan suami isteri. Apalagi dari hasil perkawinannya dulu telah memiliki banyak anak. Dengan demikian masalah iddah dapat disikapi dengan nilai-nilai keadilan dalam perspektif keadilan GENDER.

DAFTAR PUSTAKA

- Azuhaili, Wahbah. *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*. Jilid VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Bahi, Munir Ba'al. *al-Mawrid; A Modern English Arabic Dictionary*. Beirut: Dar al-'Ilmi li al-Maliyin, 1979.
- Dalizar. *Konsepsi al-Qur'an Tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1987.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Engineer, Asghar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam, (The Right of Women in Islam)*. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1994.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- FK3. *Wajah Baru Relasi Suami Isteri: Telaah Kitab 'Uqud l-Lujjain*, 2001.

- Heyzer, Noeleen. *Daughters in Industry: Work, Skill, and Conscious of Women Workers in Asia*. Kuala Lumpur: Development Center, 1988.
- Jawad, Haifaa A. *The Right of Women in Islam*. Britain: Macmillan Press, 1998.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Perempuan*. Bandung: Mizan, 2000.
- Mead, Margert. *Sex and Temperament in Three Primitive Societies*, 1935.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Murti, A. Nunuk P. *Getar Gender*. Magelang: Indonesia Tera, 2003.
- Oakley, Ann. *Sex, Gender, and Society*. New York, 1972.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. Ke-5. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Purbopranoto, Mr. Kuntjoro. *Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.
- Riyadi, Suparman Marzuki, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia PUSHAM UII, 2008.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaashid*. Jilid II. Beirut: Daar al-Fikr, t.t.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid II. Semarang: Thoha Putra, t.t.
- Sadawi, Nawal al-. *Perempuan Dalam Budaya Patriarkhi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sasongko, Sri Sundari. *Konsep dan Teori Gender*. Jakarta: Pusat dan Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 2007.
- Sodik, Muchammad. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2004.

- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Suyanto, J. Dwi Narwoko dan Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender: "Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Utami, Santi Wijaya Hesti. *Kesetaraan Gender "Langkah Menuju Demokratisasi Desa*. Yogyakarta: IP. Lappera Indonesia, 2001.